

## ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Masalah kekerasan seksual terhadap anak di JAWA BARAT, termasuk kedalamnya di Kota Bandung termasuk dalam katagori kasus tindak kejahatan kesusilaan menempati urutan 3 se-Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 322 kasus. Untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak, khusus tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa observasi, wawancara, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terdiri dari kendala intern antara lain : kurangnya operasional (dana) yang dimiliki Unit PPA Polrestabes Bandung, keterbatasannya fasilitas, kurang anggota Kepolisian wanita Unit PPA, korban sungkan melapor, korban tidak mau memberikan keterangan secara terbuka (trauma) , ketidak mengertianya korban terhadap proses penyidikan, kendala ekstern antara lain : tidak adanya laporan dari korban atau keluarga adanya kasus pencabulan, adanya ancaman dari pihak pelaku terhadap korban. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam menagani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur antara lain, melaksanakan perlindungan sesuai Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Melakukan kordinasi dengan instansi yang terkait, memberikan dukungan operasional, Upaya penyiasatan anggota Kepolisian wanita, mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA. Dan memperjuangkan hak-hak korban.

## **ABSTRACT**

*Children are a nation's asset, as part of a generation of children plays a very strategic role as a determinant of the success of a nation. Therefore, children must be protected from all possible violence, especially sexual violence. The problem of sexual violence against children in West Java, including in Bandung, including in the category of cases of moral crime, ranks 3rd in Indonesia with a total of 322 cases. To provide services and protections for children, specifically the crime of sexual violence, the police have formed a Woman's and Children's Service Unit (Unit PPA). This study aims to determine and analyze the constraints faced by PPA Polrestabes Bandung Unit in dealing with victims of criminal acts of sexual abuse against minors in the jurisdiction of the Bandung Polrestabes. This study uses descriptive analytical research. The type of data used in this study includes primary data in the form of observation, interviews, and secondary data. The results showed that the constraints faced by PPA Polrestabes Bandung Unit in dealing with victims of criminal acts of sexual abuse against minors were from internal obstacles, including: lack operational (funds) owned by PPA Polrestabes Bandung Unit, limited facilities, less members of PPA Unit women's police, the victim was reluctant to report, the victim did not want to give information openly (trauma), the victim did not understand the investigation process, external constraints included: the absence of reports from victims or families of cases of sexual abuse, threats from the perpetrators against the victims. Efforts were made by PPA Polrestabes Bandung Unit to overcome obstacles in dealing with victims of criminal acts of sexual abuse against minors, among others, carrying out protection in accordance with Indonesia Police Regulation No. 3 of 2008. Conducting coordination with relevant agencies, providing operational support, efforts to circumvent female police officers, submit a request for additional construction of a special room for the PPA Unit. And fight for victims rights.*